BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Elite Lokal

1. Pengertian Elite Politik Lokal

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Elite Lokal untuk melihat dan menganalisis peran organisasi pencak silat dalam dinamika politik Pilihan Kepala Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Hal ini karena penelitian ini memfokuskan pada Elite Ormas Pencak Silat yang menjadi basis dukungan para kontestan politik dalam dinamika Pemilihan kepala desa tersebut. Untuk menjelaskan fenomena diatas digunakan teori elite lokal.

Suzanne Keller menjelaskan bahwa elite tidak bersifat tunggal, elite merupakan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang massa masing-masing. Elite-elite yang menonjol ini merupakan minoritas kecil yang teroganisasi rapi dan kohesif dan masyarakat dianggap dapat diatur dikarenakan sifatnya yang mayoritas dan apatis. Pihak pihak yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa di dalam maupun luar pemerintahan akan disebut “elite strategis”. Elite sebagai penguasa juga dapat melakukan monopoli kekuasaan yang memudahkan untuk tujuan tujuan yang baik bagi mayoritas yang dipimpinnya, seperti menyejahterakan rakyat, peningkatan pendidikan, perluasan lapangan kerja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga dapat di gunakan untuk hal yang tidak baik seperti mencari keuntungan sendiri untuk kepentingan individu dan kelompok. [1]

Dinamika elite dalam konteks sebuah organisasi sosial keagamaan dan kerangka sistem politik, merupakan kelompok kepentingan (Interest group) yang terlibat proses fungsi input. Intensitas kelompok ini dalam melakukan input tergantung oleh dinamika internal dan kekuatan moral yang menggerakkan aktivitas dan perubahan kelompok tersebut.[2] Dinamika dalam elite lokal sangat dipengaruhi oleh adanya konstruk dan pola kehidupan suatu kelompok. Hal ini karena antara kelompok sosial di masyarakat memiliki karakter masing-masing. Seringkali adanya suatu kepentingan individu dalam suatu tujuan kelompok mengakibatkan persaingan internal kelompok tersebut. Dari pandangan eksternal antara kepentingan kelompok satu dan lainnya menciptakan suatu persaingan yang tidak jarang menimbulkan konflik. Kelompok ataupun pengaruh individu inilah yang merupakan elite yang menciptakan dinamika dalam kehidupan sosial politik.

Munculnya elite lokal dalam percaturan dinamika politik pada proses pemilihan umum adalah bentuk dari adanya perubahan tatanan social politik di suatu Negara. Di Indonesia indikasi utamanya adalah adanya reformasi sebagai tanda lengsernya Orde Baru telah memberikan angin segar bagi

---

[1] Suzzan Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elite* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): Birhan Aditya Nadeyoga, "Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2014), 41.

[2] Hilmy Mohtar, *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri* (Malang: UB Press, 2011), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan demokrasi. Setelah lengsernya pemerintahan pusat ini juga diiringi oleh adanya otonomi daerah yang diwujudkan untuk menciptakan desentralisasi pembangunan. Oleh karena pemisahan kekuasaan antara daerah dan pusat inilah memunculkan suatu pelaku politik baru didaerah yang dahulunya didominasi oleh penguasa yang dinaungi pemerintah Orde Baru.[3]

Aktor politik pada masa transisi demokrasi ini banyak didominasi oleh pelaku lama dan peserta baru yang lahir dari elite lokal di daerah. Lahirnya elite lokal ini merupakan suatu bentuk gerakan kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Pada awalnya kelompok ini terpaksa tertekan pada sistem pemerintahan, namun dalam perkembangannya kelompok-kelompok kepentingan ini mulai muncul dan ikut dalam pesta demokrasi seiring dengan adanya transisi sistem politik pemerintahan.

Dalam tugas dan kemampuannya elite pun juga terdapat kelas, elite kelas pertama dan kelas kedua, dimana elite kelas kedua akan menjadi pengganti elite pertama, elite kedua juga dapat menjadi tandingan elite pertama jika elite pertama tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan baik.[4] Secara tidak langsung elite mempunyai pengaruh besar dalam perubahan kehidupan sosial, sebagai pihak yang menjadi acuan dan pemegang kekuasaan dalam dinamika masyarakat. Karena sifat elite yang tidak tunggal, hal ini mengindikasikan adanya sebuah tidak tunggal, hal ini mengindikasikan

[3] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal : dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2-3.
[4] Suzzan Keller, *Penguasa Dan Kelompok Elite* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995): Birhan Aditya Nadeyoga, "Peran Elite Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Proses Politik Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, (Januari, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya suatu pola yang terstruktur yang dijalankan kelompok elite lokal. Elite sendiri memiliki masing-masing cara dalam melakukan manuver politik untuk memobilisasi konstituennya sebagai basis legalitas elite tersebut. Sehingga elite memainkan peranan penting dalam melakukan suatu kendali atas perubahan yang ada di masyarakat melalui kekuasaannya.

Para tokoh pemikir memandang elite berbeda dalam adanya distribusi kekuasaan yang di laksanakan oleh elite. Tetapi di dalam perbedaan tersebut ada kesimpulan hal yang sama, contohnya adalah social goods yang tidak bisa di bagikan secara merata. Hal ini juga merupakan dasar bagaimana terbentuknya elite, dimana masyarakat dengan sendirinya terbagi menjadi dua golongan, golongan yang mempunyai kekuasaan penting (elite) dan golongan yang tidak mempunyai kekuasaan penting (massa).[5] Sifat elite sendiri cenderung lebih tersistematis dalam sebuah kesatuan berpikir dan tindakannya. Kekuatan politis elite yang mampu mengakomodir internalnya ini mampu memberikan suatu status kedudukan di masyarakat. Sehingga keberadaan elite ini mampu menekan kelompok lainnya dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Elite sendiri memiliki perbedaan sesuai dengan karakter wilayahnya, dimana dalam lingkup wilayah kecil seringkali elite lokal bersifat tunggal dalam artian kekuasaannya mutlak disemua bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Dalam lingkup wilayah yang luas kecenderungan

[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distribusi kekuasaan tidak dikuasai secara tunggal. Melainkan banyak kepentingan yang hadir menguasai setiap bidang aspek kehidupan masyarakat.

2. Dinamika Konflik Dalam Sirkulasi Elite

Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu atau pergantian elite ditingkat lokal memang berbeda-beda, ada yang sebagai kelompok pendukung, sebagai kelompok oposisi maupun sebagai kelompok netral yang mencoba untuk mengawasi proses sirkulasi elite.[6] Masyarakat sebagai basis masa kekuatan elite hanya dijadikan suatu kendaraan politik untuk melancarkan kepentingannya. Kekuasaan Elite sendiri juga tergantung pada suatu legitimasi atau pengakuan dari masyarakat, sehingga keberlangsungan kedudukan elite sendiri membutuhkan dukungan masyarakat.

Adanya loyalitas dukungan masyarakat terhadap elite seringkali menimbulkan suatu fanatisme yang berlebihan, dukungan yang sifatnya hanya partisipan politik berubah menjadi pola dukungan yang cenderung egoistik. Pola dukungan yang egoistik tersebut akan meruncing terhadap tergerusnya nilai toleransi perbedaan pandangan. Akibatnya terjadi suatu gesekan konflik baik secara horisontal maupun secara vertikal.

Konflik secara horisontal disini melibatkan antar masa pendukung, sedangkan secara konflik secara vertikal melibatkan pertentangan antar elite dalam sebuah perbedaan kepentingan. Persaingan tersebut akan memunculkan pemenang dalam menguasai kedudukan suatu sistem sosial utamanya sebuah

[6] Moch Nurhasim, *Konflik antar Elite politik lokal : dalam pemilihan kepala daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, kemudian kelompok yang kalah akan menjadi basis oposisi pemerintahan yang menang.

Kajian Elite lokal ini akan membagi dua kategori elite dalam konteks lokal yaitu,

a. Elite politik lokal yang merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif atau legislative yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal.
b. Elite non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain di lingkup masyrakat.[7]

Kedua kategori tersebut merupakan suatu indikator dalam membaca dinamika elite lokal di daerah. Adanya persaingan dalam mendapatkan kekuasaan politik dalam daerah, seringkali menimblukan konflik antar elite yang selalu menghidupkan politik dalam desa. Konflik elite ini dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat Faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya, yaitu :

Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran

[7] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak sejalan sesunguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar.[8]

Persaingan yang begitu ketat memperlihatkan adanya suatu kepentingan yang besar dari para elite politik. Elite dalam ranah lingkup luas seringkali memiliki kepentingan akan keuntungan besar yang lebih bersifat materi. Sedangkan dalam lingkup daerah yang cenderung sempit lebih berfokus pada ranah kulturalisme dan status sosial di masyarakat. Karena kekuasaan sendiri memiliki kapasitas dan juga jumlahnya yang terbatas, sehingga pasti menimbulkan suatu gesekan atau konflik untuk memperebutkannya. Semakin tinggi sumber keuntungan yang didapatkan dari kekuasaan tersebut akan berpotensi menimbulkan suatu dinamika konflik yang berkepanjangan.

Dalam beberapa pandangan tokoh menyebutkan adanya suatu sirkulasi dalam pergantian elite, seiring dengan beragamnya kepentingan baik antar kelompok dan juga dalam kelompok tersebut. Menurut Pareto sirkulasi elite terjadi dalam dua kategori, Pertama, pergantian terjadi di antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri. Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu :

[8]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elite yang sudah ada
b) Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elite yang sudah ada.[9]

Dari pandangan diatas memperlihatkan adanya suatu struktur percaturan konflik elite dalam menguasai kedudukan politik. Seringkali perebutan kekuasaan politik tidak hanya bersifat eksternal dari kelompok elite, melainkan juga dari dalam elite sendiri atau konflik internal kelompok. Sehingga dalam elite lokal yang bersifat kelompok ternyata juga mengindikasikan adanya suatu pola saling memperebutkan kekuasaan elite dalam kelompoknya sendiri. Ketika terjadi konflik internal akan mengakibatkan adanya suatu perpecahan atau kubu dalam kelompok elite tersebut. Tidak jarang perpecahan tersebut akan membentuk kelompok baru yang muncul di permukaan sebagai kekuatan tandingan elite yang lama.

Sedangkan dari sudut pandang konflik yang kedua lebih memperlihatkan persaingan dari eksternal atau kelompok elite lain dalam sebuah sistem sosial. Menurut Mosca, Pergantian elite terjadi apabila elite yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan digantikan oleh

[9] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelas penguasa yang baru.[10] Sistem ini ingin melihat suatu interaksi antara kelompok elite yang melakukan suatu persaingan politik dalam menguasai kedudukan pemerintahan. Dimana kelompok pesaing selalu mencari celah untuk melakukan suatu serangan agear menjatuhkan pihak kelompok elite yang berkuasa. Jika melihat dari sudut pandang ini lebih berfokus pada analisis kelompok elite secara komperhensif daripada aktor yang berkepentingan dalam kelompok.

Dari adanya sebuah konflik yang selalu terjadi dalam pertarungan elite lokal tersebut. Sesuai dengan pandangan Duveger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti organisasi, dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik dan lain sebagainya.[11] Dalam sebuah negara demokrasi adanya dukungan basis jumlah masa sangat memengaruhi dalam persaingan politik. Karena legalitas politik berada di tangan rakyat, sehingga jumlah organisasi yang banyak akan menjadikannya elite yang kuat dalam persaingan politik.

Selain itu adanya permainan uang juga sangat menentukan dalam merubah konsepsi berpikir orang. Baik uang ini sebagai mahar lobi ataupun menjadi alat money politik terhitung sangat efektif memobilisasi dukungan. Oleh karenanya dalam sistem demokrasi ini kekuatan elite lokal tidak lagi terpusat, melainkan semua golongan mampu bersaing dalam dinamika politik secara menyeluruh. Sehingga segala sesuatu kegiatan yang mengunakan

[10] Ibid.
[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi alat politik dapat diukur dari arah tujuan beserta kepentingan yang ingin dicapai.

Dalam dinamika politik ranah lokal, kecenderungan terjadi persaingan politik lebih terasa secara langsung. Kondisi tersebut karena ranah lokal yang begitu sempit lingkupnya, sehingga afiliasi kelompok beserta kepentingannya sangat terlihat dalam pola pergantian pemimpin politik. Masyarakat akan sangat begitu merasakan dengan adanya pertarungan kelompok elite lokal daripada tingkat nasional. Ideologi suatu kelompok seringkali menjadi acuan kepentingan sebuah kelompok untuk menguasai kekuasaan politik. Begitu juga arah dukungan masyarakat tingkat lokal cenderung memilih kedekatan ideologi dalam pandangan politiknya.

Budaya lokal seringkali menjadi afiliasi elite-elite politik untuk mendekati kekuatan elite budaya. Elite budaya disini memiliki kekuasaan dalam memobilisasi masa lewat peran elite lokal. Untuk mnganalisis mengenai dukungan masyarakat ini, teori tentang jaring kekuasaan bisa digunakan sebagai alat analisis, karena didalamnya dapat menjelaskan mengenai jaringan kekuasaan serta berbagai kepentingan dibalik hubungan seperti itu.[12] Jika membahas mengenai jaringan kekuasaan dalam tingkat lokal, tidak lepas dari adanya kultur budaya setempat. Kenampakan yang menunjukkan hubungan antara elite politik yang menjalin interaksi dengan elite lokal ini mengindikasikan adanya pola *patron-clien* yang terbentuk.

[12] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya interaksi simbolik antara aktor politik dengan elite lokal ini senantiasa menjadi cara dalam meraih dukungan entitas masyarakat.

Pola hubungan timbal balik antara elite lokal dengan elite politik memberikan dampak pada pendalaman ikatan primordial, selanjutnya menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap elite tersebut. Afiliasi dukungan ini selalu dilakukan secara berkelanjutan, dengan memberikan sebuah balas budi politik lewat kekuasaan yang dimiliki. Namun seiring perubahan sosial, pada era demokrasi ini juga sangat tidak menguntungkan menggunakan model patron-client. Kebebasan dalam berkelompok dan berpendapat mengakibatkan mudahnya pertumbuhan entitas budaya, agama ataupun ideologi lainnya dalam masyarakat lokal. Akibatnya mengusik hubungan patron-client tersebut. Indikasinya adalah adanya perecahan dari hubungan patronase tersebut akibat saling memiliki kepentingan.

Dengan memiliki kekuatan masing-masing baik kekuatan mobilisasi masa maupun kekuasaan politik, seringkali berpotensi pada egoisme individu demi kepentingannya. Karena tolak ukur dari sistem *patronase* dapat dilihat dari kadar kepentingan masing-masing elite. Dari teori elite politik ini peneliti ingin menganalisis kenampakan dinamika politik yang ada pada masa pemilu desa Padas kecamatan Dagangan Kab. Madiun. Dimana dalam kondisi sosial politik yang ada di desa Padas memperlihatkan adanya hubungan antara kontestan pemilu dengan actor atau kelompok elite lokal di desa tersebut. Sehingga menimbulkan suatu interaksi antar kelompok masyarakat yang mengindikasikan adanya konflik antar elite lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini elite lokal yang dimaksud adalah pengaruh budaya silat yang telah menjelma menjadi kelembagaan organisasi. Dengan struktur organisasi yang rapi dan sistematis dan didorong oleh sistem budaya tradisional menciptakan loyalitas atau fanatisme anggotanya dalam tujuan organisasinya. Adanya perbedaan silat ini menciptakan suatu persaingan dalam meraih kontestan anggotanya terlebih ditingkat desa. Perbedaan varian organisasi pencak silat dalam tiap desa bahkan dalam internal desa seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial. Hal ini diakibatkan oleh Faktor identitas kelompok yang sangat tinggi menimbulkan ke fanatikan masa anggotanya. Akibatnya persaingan tersebut mengarah kepada ranah kekuasaan politik, karena kelompok organisasi pencak sliat yang terstruktur dan memiliki masa yang solid dalam organisasinya. Oleh karena itu perlunya suatu kajian untuk menganalisis bagaimana elite-elite desa ini memberikan pengaruhnya dalam mewarnai dinamika politik desa Padas selama ini.

B. Teori Patrimonialisme

Patrimonial memfokuskan kajiannya pada sistem kebudayaan dalam memengaruhi proses pemerintahan. Eksistensi budaya sebagai produk dari peradaban menciptakan suatu identitas sosial masyarakat. Budaya menjadi paradigma esensial dalam proses berpikir masyarakat. Paradigma budaya ini kemudian membangun tatanan politik suatu pemerintahan.

Menurut Crouch teori Patrimonialisme mengacu pada hubungan patron-clien yang terstruktur secara vertikal. Di Indonesia Sumberdaya-sumberdaya disalurkan kepada "*clien*" dengan berbagai kartel *patron-clien* yang saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersaing untuk mendapatkan hadiah yang dipencarkan oleh penguasa, dan ditempatkan sebagai oposisi dengan pemerintahan modern.[13] Dari pemaparan tersebut memperlihatkan adanya faktor budaya yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Relasi *patron-clien* seringkali dipratekkan dalam konstelasi politik di Indonesia. Pengaruh tradisi adat masyarakat yang masih kental memiliki doktrin kuat dalam konstruksi kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem kerajaan yang mendominasi kekuasaan masyarakat sebelum kemerdekaan telah membelenggu paradigma berpikir masyarakat.

Pola *patron-clien* menjadi strategi yang efektif dalam membangun roda kekuasaan. Relasi tersebut didasarkan atas kebutuhan masing-masing aktor politik. Dengan cara bertukar sumberdaya diharapkan mendapatkan keuntungan pada masing-masing pihak. Tipikal masyarakat yang masih menerapkan perilaku tradisional sangat relevan dalam mendukung berjalannya relasi *patron-clien* tersebut. Antara *Patron* dan *clien* disini saling membutuhkan dalam mengamankan kedudukan politiknya. Sehingga relasi tersebut didasarkan atas motif kepentingan politik. Dengan perubahan suatu kepentingan dari masing-masing aktor seringkali dapat merubah posisi *patron* dan *clien* sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Pemerintahan modern disini adalah sistem pemerintahan yang telah menerapkan konsep negara demokratis. Dengan demikian perubahan kondisi sosial sesuai perkembangan zaman tidak menggeser paradigma budaya dalam

[13] Edisius Riyadi Terre, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad 21 hingga Era Reformasi/Tod Jones* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memengaruhi tatanan politik kekuasaan daerah. Konsep ini kemudian disebut dengan neo-patrimonialisme.[14] Fokus pada kajian neo-patrimonialisme menekankan pada pergeseran budaya yang merefleksikan perubahan sosial dengan berkamuflase menuju ruang modernisasi sistem politik. Pelaku budaya ini merubah struktur kelompoknya tanpa mengubah karakter budayanya. Adanya ikatan primordial dalam sistem kebudayaan masyarakat mampu diarahkan ke ranah politik.

Pada model sistem politik patrimonialisme ini sistem politik dilihat dari segi persaingan memperebutkan sumberdaya, bukan pada ranah benturan ideologi kelompok-kelompok kepentingan atau faktor kebijakan politik. Kebijakan yang bersifat politik tidak sesuai dengan sistem patrimonial. Ketidaksesuaian tersebut dilihat dari dua hal, Pertama, kebudayaan berperan dalam membentuk sistem pemerintahan tanpa melihat sisi orientasi kebijakan yang memengaruhi budaya. Kedua, persaingan antar kelompok kebudayaan memiliki fokus dan basis yang sama dalam paradigma cara berpikir serta tujuannya.

Kondisi tersebut menyimpulkan adanya konflik yang bersifat individual dari sisi kepentingan kelompok budaya bukan dari cara pandang budaya terhadap sistem pemerintahan. Di Indonesia perilaku Neo-patrimonialisme telah lama hadir sejak berdirinya bangsa ini. Lewat peranan Presiden Soekarno berusaha menciptakan sebuah sistem pemerintahan modern yang berorientasi pada paradigma budaya, tercermin dalam semangat nasionalisme. Namun kondisi tersebut tidak mampu dikendalikan oleh kekuasaan Presiden. Tajamnya jarak

[14] Ibid., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideologi antar golongan yang muncul pada masa demokrasi liberal, mengakibatkan distabilitas pemerintahan pusat akibat lemahnya sumber daya Presiden dalam mengolah kekuasaan. Pemerintahan Soekarno gagal dalam memberdayakan sistem patrimonialisme pada masa awal pemerintahan Indonesia.

Sistem patrimonial berhasil diterapkan oleh masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan menerapkan sistem otoritariannya, Soeharto mampu menghegemoni sistem politik. Sehingga kekuatan-kekuatan ideologis tidak ada yang muncul ke permukaan. Sistem politik masa ini cenderung stabil karena dikuasai oleh basis kelompok. Adanya kekuasaan Presiden yang mutlak ini membentuk suatu sistem politik patrimonial. Kekuasaannya bersifat oligarki, sehingga antara Presiden dan struktur pemerintahan lainnya memainkan peran *patron-clien*.

Kekuatan patrimonial suatu negara tidak dilihat dari sisi rasionalitas dan keadilan dalam kepemimpinan. Melainkan adanya unsur kekuatan pemersatu lewat basis kekuasaan untuk mempersempit perbedaan ideologi. Dengan demikian sistem patrimonial akan lebih stabil. Untuk menjaga stabilitas keutuhan budaya sendiri dibutuhkan suatu alat integritas dan dukungan masa. Integritas suatu kelompok budaya dalam sistem patrimonialisme sangat penting untuk mengamankan kekuasaan politiknya. Kelompok yang berbasis budaya disini memainkan perannya sebagai elit lokal. Keselarasan arah pandangan seluruh anggota kelompok menjadi suatu modal utama dalam menghadapi adanya perpecahan. Jika ada sebuah perpecahan maka adanya keselarasan pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menciptakan sisi loyalitas anggota lainnya terhadap kelompok, sehingga memperkecil besaran konflik yang bisa mengganggu stabilitas kelompok.

Sedangkan dengan kekuatan masa, kelompok tersebut memiliki basis dukungan yang kuat. Umumnya masyarakat yang masih tradisional terintegrasi lewat ikatan primordial. Sehingga belum mempunyai suatu pandangan yang kritis, hal ini dapat menjadi suatu sumber legitimasi kelompok. Dengan teori patrimonial ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana kelompok-kelompok elit lokal dalam memainkan dinamika politik Desa Padas. Faktor keluarga dan pencak silat serta adanya paradigma budaya menjadi kunci dalam melihat patrimonialisme sistem Pemerintahan Desa Padas.

C. Teori Peran

Dalam kajian peneilitan ini teori peran dibutuhkan untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana aktor-aktor elit lokal melakukan suatu perannya dalam mewarnai dinamika politik Desa Padas. Peranan berasal dari dua kata dasar "peran" dan tambahn "an". Peran merupakan suatu tugas dan kewajiban yang dilaksanakan. Sedangkan Peranan mempunyai arti suatu harapan yang yang dimiliki seseorang oleh kedudukannya di masyarakat.[15] Pada ranah sosial peran ini menyangkut suatu status atau kedudukan yang disandang oleh seseorang. Sehingga antara peran dan kedudukan ini saling memengaruhi. Peran seseroang dalam sebuah lingkungan masyarakat akan menciptakan status sosialnya. Sedangkan dengan status sosial atau kedudukannya orang tersebut memiliki

[15] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 751.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan serta dituntut untuk berperilaku sesuai fungsi posisinya. Oleh karenanya peran adalah separangkat sistem perilaku yang terbentuk sesuai dengan status kedudukan sosial individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula peranan merupakan suatu bentuk perilaku individu atau kelompok dalam sebuah fenomena sosial.

Melalui sebuah kedudukannya ini masyarakat menaruh suatu harapan-harapan agar orang tersebut melakukan suatu hal yang berkaitan dengan posisinya. Pola interaksi manusia dalam masyarakat akan membentuk suatu status sosial. Kedudukan disini terbentuk oleh kondisi sumber daya yang dimilikinya. Sehingga dengan kondisi tersebut seseorang diharapkan melakukan suatu hal sesuai fungsi kedudukannya. Sumber kedudukan masyarakat disini sangat luas, bisa dalam artian karakter atau identitas dan juga sumber materi yang membentuk status sosialnya. Hal tersebut juga termasuk pada sebuah kedudukan budaya dalam masyarakat.

Sistem budaya yang menggerakkan sistem berpikir dan tingkah laku masyarakat seringkali diidentikan dengan peran dalam skala kolektif. Paradigma sebuah budaya akan membentuk sistem masyarakat yang memiliki hirarki kelas sosial. Adanya sebuah organisasi ataupun kelompok budaya menempati hirarki tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kelompok budaya akan menciptakan suatu sistem yang terorganisir secara primordial. Dalam sebuah sistem tersebut terdapat organ-organ yang saling bekerja sesuai dengan status dan fungsinya secara otomatis. Pola interaksi inilah yang kemudian membentuk suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran paradigma budaya dan kelompok sosial terhadap dinamika politik masyarakat.

Menurut Soerjono membagi definisi peranan ke dalam beberapa bentuk pengertian sebagai berikut :

a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.[16]

Proses interaksi sosial dalam mengaktualkan peran masing-masing individu pada kehidupan sosial akan terjalin secara otomatis. Karena peran disini memiliki nilai fungsi, sehingga fungsi tersebut akan membentuk kesatuan dalam sebuah sistem. Misalnya dalam ranah organisasi setiap status dan kedudukan memiliki fungsi dan karakter tersendiri. Sehingga setiap kedudukan yang dimilikinya ini akan bekerja sesuai perannya masing-masing. Adanya kondisi sosial juga sangat memengaruhi peran. Selain fungsi kedudukan sosial dalam memengaruhi arah gerakan peran seseorang, adanya kondisi sosial yang selalu dinamis akan merubah peran tersebut sesuai kepentingannya.

Teori peran dalam kajian ini akan digunakan dalam menganalisis percaturan politik elite Desa Padas. Mulai dari eksistensi elite lokal berbasis keluarga sampai kedudukan pencak silat dalam pranata sosial masyarakat Desa

[16] Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Rajawali, 1990), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padas. Kemudian mampu mengungkapkan bagaimana peran organisasi pencak silat ini menggunakan kedudukannya untuk masuk keranah politik lokal Desa Padas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id